



LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TRIWULAN I

BPRPPUPP PALEMBANG



**BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM
DAN PENYULUHAN PERIKANAN
PUSAT RISET PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2018**



BRPPUPP

Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan

Inland Fishery Resources Development And Management Department (IFRDMD)





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BP3U Triwulan I Tahun 2018. LkjIP BP3U disusun dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN – RB) Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban BP3U dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitannya dengan terselenggaranya *good governance*. Laporan Akuntabilitas Kinerja BP3U Tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai, serta langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dan program penelitian dan pengembangan iptek kelautan dan perikanan. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil-hasil penelitian dan pengembangan iptek kelautan dan perikanan.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Palembang, Maret 2018
Kepala Balai P3U


Dr. Arif Wibowo, SP., M.Si



DAFTAR ISI

Tim Penyusun
Kata Pengantar
Daftar Isi

I. Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan	1
1.3. Gambaran Umum Organisasi	2
1.4. Sistematika Laporan	6
II. Perencanaan Kinerja	
2.1. Sasaran Strategis dan Rencana Kerja Tahunan BP3U TA 2018	8
2.2. Penetapan Kinerja BP3U Tahun 2018 / Perjanjian Kerja.....	8
III. Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja Organisasi	
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018.....	8
3.2. Hasil Pengukuran Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS), Nilai Pencapaian Inisiatif Strategis (NPIS) dan Nilai Kinerja Keseluruhan (NKK) Balitbang KP.....	8
3.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja:.....	8
B. Realisasi Anggaran	
IV. Penutup	
4.1. Kesimpulan	12
4.2. Penutup	12

Lampiran



I/ PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Definisi kinerja instansi pemerintah sendiri menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No : 239/IX/6/8/2003 adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan pada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan LkjIP BRPPUPP didasarkan pada indikator kinerja yang ada yang ditetapkan lewat tujuan dan sasaran yang direncanakan. Realisasi dan dilaporkan dalam LKjIP ini adalah realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disusun.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BRPPUPP untuk meningkatkan kinerjanya.



1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan yang selanjutnya disingkat BRPPUPP, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor KEP.176/MEN/KU.611/2017 tanggal 22 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang Riset Perikanan Perairan Umum Daratan dan Penyuluhan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Riset Perikanan. Institusi ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Riset perikanan perairan umum daratan yang meliputi seluruh wilayah Indonesia dan Penyuluhan Perikanan yang meliputi 5 (lima) Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.

Dalam melaksanakan tugasnya, BRPPUPP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
2. Pelaksanaan Riset perikanan perairan umum daratan meliputi ekosistem waduk, ekosistem danau, ekosistem sungai dan rawa banjiran, dan ekosistem estuaria, di bidang biologi, ekologi, dinamika dan genetika populasi, lingkungan sumber daya dan plasma nutfah ikan perairan umum daratan;
3. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama Riset perikanan perairan umum daratan;
4. Pengelolaan prasarana dan sarana Riset; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
6. Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.

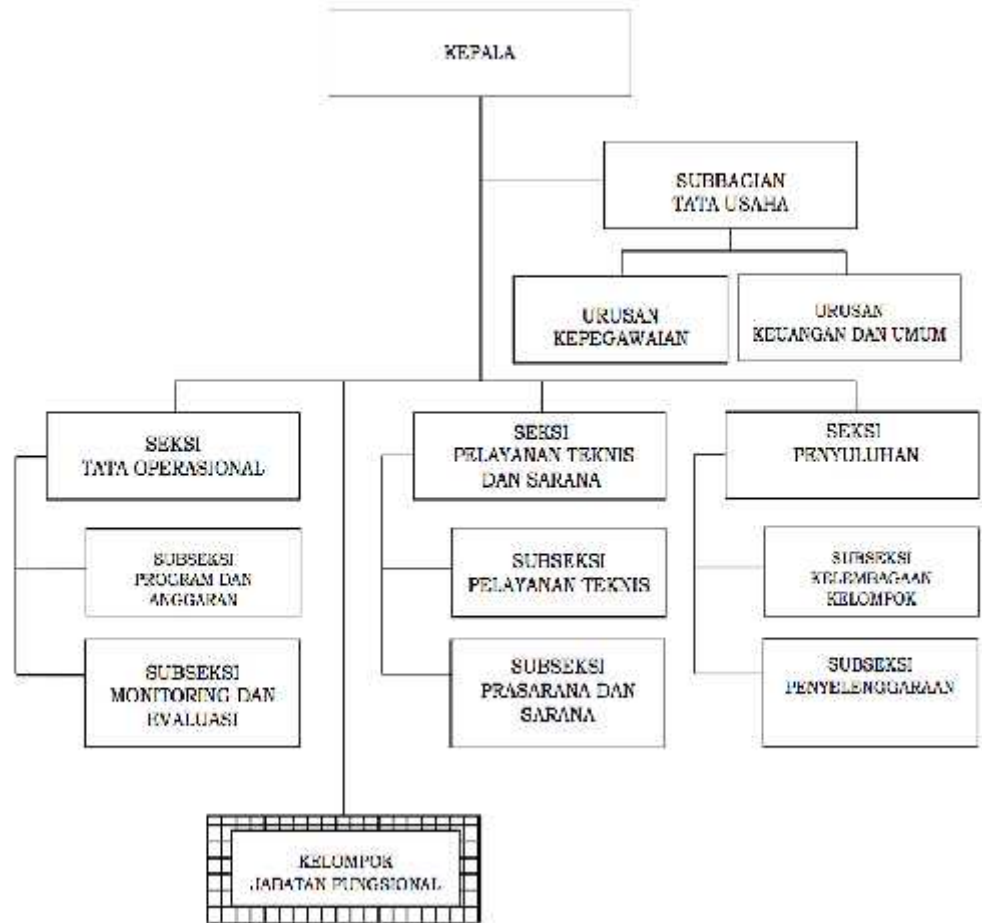
Keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BRPPUPP perlu dievaluasi, sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pasal 3, yaitu penyelenggaraan negara harus mengacu kepada azas proporsionalitas, profesional dan akuntabilitas.

Struktur organisasi BRPPUPP dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang membawahi (i) Subbagian Tata Usaha, (ii) Seksi Tata Operasional, (iii) Seksi Pelayanan Teknis dan Sarana, (iv) Seksi Penyuluhan dan (v) Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha terdiri atas (i) Urusan Keuangan dan Umum dan (ii) Urusan Kepegawaian. Seksi Tata Operasional membawahi dua Subseksi, yaitu: (i) Subseksi Program dan

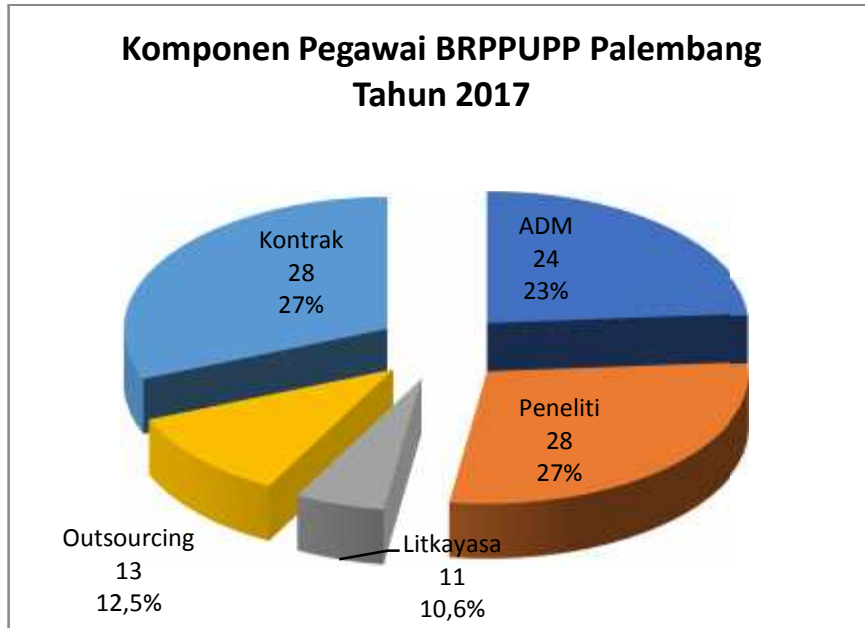


(ii) Subseksi Monitoring dan Evaluasi, Seksi Pelayanan Teknis dan Sarana terdiri atas (i) Subseksi Pelayanan Teknis (ii) Subseksi Prasarana dan Sarana, dan Seksi Penyuluhan terdiri atas (i) Subseksi Kelembagaan Kelompok (ii) Subseksi Penyelenggaraan. Struktur organisasi BRPPUPP tersaji dalam gambar berikut.



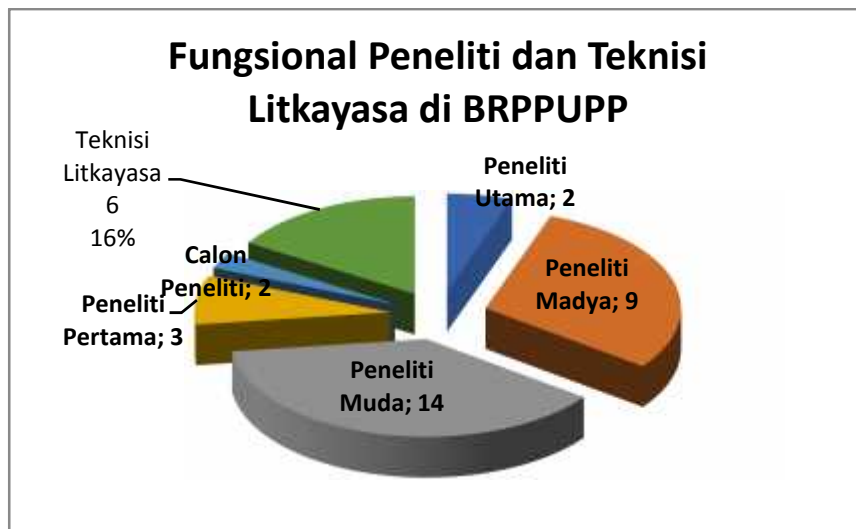
Gambar 1. Struktur Organisasi BRPPUPP

Total pegawai BRPPUPP secara keseluruhan berjumlah 104 pegawai/karyawan. Tenaga kontrak dan outsourcing berperan dalam membantu kegiatan laboratorium (kualifikasi S_1 dan D_3), administrasi, perpustakaan, komputer, satpam, driver, dan cleaning service



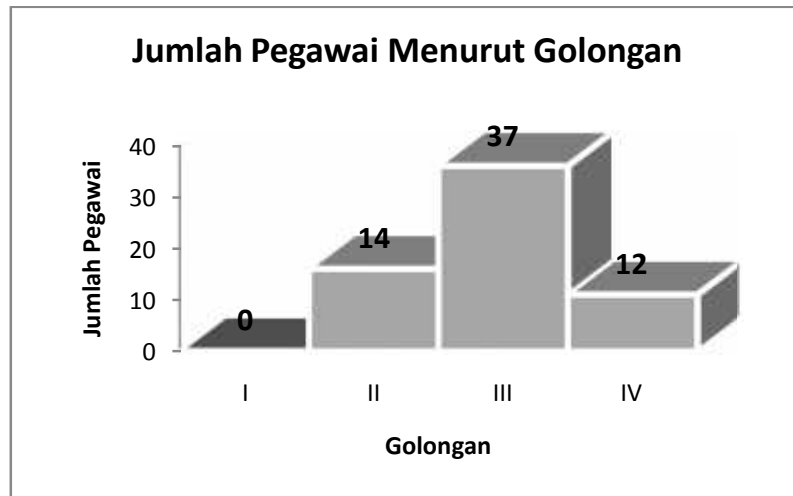
Gambar 2. Grafik Komponen Pegawai BRPPUPP Palembang Tahun 2018

Sedangkan untuk menunjang kegiatan Riset, BRPPUPP memiliki 37 tenaga fungsional yang terdiri atas peneliti dan teknisi litkayasa.



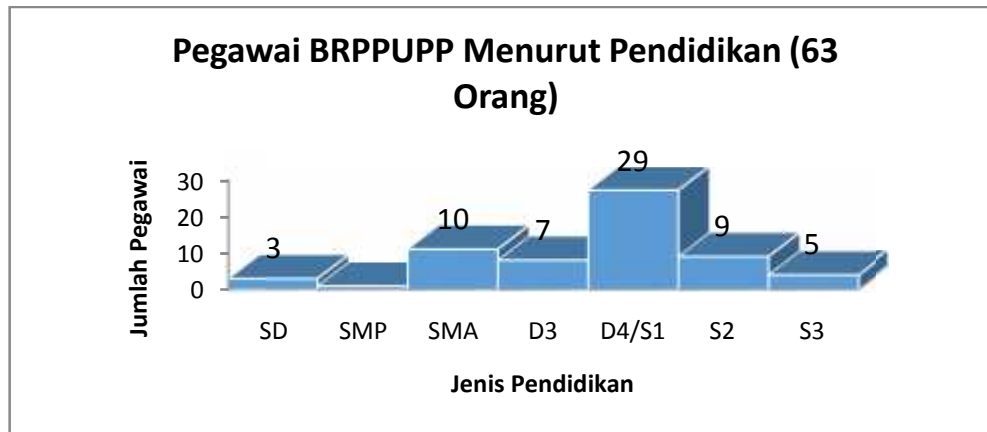
Gambar 3. Grafik Fungsional Peneliti BRPPUPP tahun 2018

Bila dirincikan, BRPPUPP memiliki 2 orang Peneliti utama, 9 orang Peneliti Madya, 14 orang Peneliti Muda, 3 orang Peneliti Pertama, 2 orang Calon peneliti, serta 6 orang Teknisi Litkayasa.



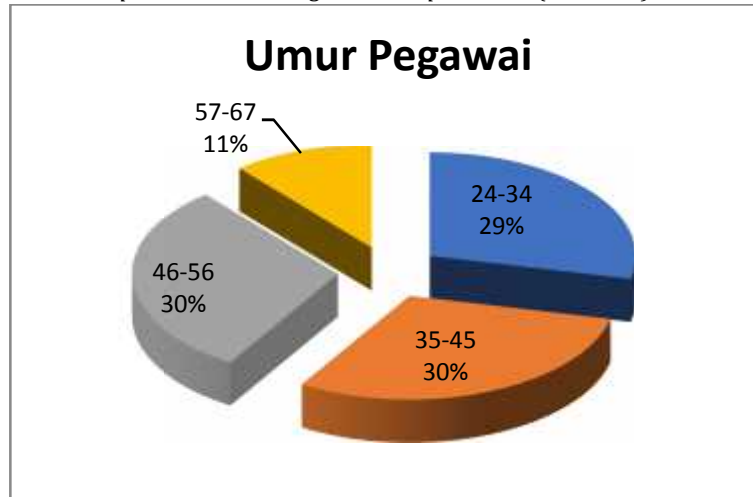
Gambar 4. Grafik Pegawai BRPPUPP Menurut Golongan

Dilihat pada grafik diatas, maka komposisi pegawai BRPPUPP paling banyak pada Golongan III yaitu sebanyak 37 orang (58,73%), sedangkan jumlah paling sedikit pada Golongan IV yaitu sebanyak 12 orang (19,05%).



Gambar 5. Grafik Pegawai BRPPUPP Menurut Jenjang Pendidikan

Tergambar bahwa pegawai BRPPUPP didominasi dengan tingkat pendidikan D4/S1 sebanyak 29 orang (46,03%), disusul dengan pendidikan SMA sebanyak 10 orang (15,87%), pendidikan S2 sebanyak 9 orang (14,29%), pendidikan D3 sebanyak 7 orang (11,11%), pendidikan S3 sebanyak 5 orang (7,94%), pendidikan SD sebanyak 3 orang (4,76%).



Gambar 6. Grafik Klasifikasi Umur Pegawai PNS BRPPUPP

Jumlah pegawai menurut kelompok umur 24-34 sebanyak 18 orang, kelompok umur 35-45 sebanyak 19 orang, kelompok umur 46-56 sebanyak 19 orang, dan kelompok umur 57-67 sebanyak 7 orang.

Hingga akhir Maret tahun 2018, jumlah pegawai BRPPUPP berjumlah 63 orang PNS dan 28 orang tenaga kontrak, 13 orang tenaga outsourcing total pegawai BRPPUPP secara keseluruhan berjumlah 104 pegawai/karyawan.

1.4 SISTEMATIKA LAPORAN

Pada dasarnya laporan ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja BRPPUPP tiap triwulan pada tahun 2018. Capaian kinerja (*performance results*) 2018 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian laporan ini adalah sebagai berikut :

Format Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah
(Penerapan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014)

BAB I – PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, gambaran umum organisasi, dan sistematika laporan.

BAB II – PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan muatan rencana strategis BRPPUPP, sasaran strategis, rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja/perjanjian kinerja di tahun 2018



BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

BAB IV – PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan, permasalahan dan tindak lanjut

LAMPIRAN



II/ PERENCANAAN KINERJA

2.1. SASARAN STRATEGIS DAN RENCANA KERJA TAHUNAN BRPPUPP TA 2018

Belum ada informasi

2.2. PENETAPAN KINERJA BRPPUPP TAHUN 2018 / PERJANJIAN KERJA

Belum ada informasi

III/ AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TRIWULAN 1 TA 2018

Belum ada informasi

3.2. HASIL PENGUKURAN NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS (NPSS)

Belum ada informasi

3.3. EVALUASI DAN ANALISIS KERJA

Belum ada informasi



B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran triwulan ke I meningkat dari bulan Januari, Februari dan Maret masing masing 2,99%, 13,09% dan 22,74%. Nilai total serapan dalam ke tiga bulan disajikan dalam tabel perkembangan anggaran dalam Triwulan ke I.

Tabel I. Perkembangan anggaran Bulan Januari

No	UPT / Output	DIPA	Anggaran s/d Januari 2018			
			Target		Realisasi	
		Rp	Rp	%	Rp	%
	BRPPUPP Palembang					
	PELATIHAN DAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
1	Tenaga penyuluh yang melakukan penyuluhan	2.986.725.000				
2	Kelompok pelaku utama/usaha yang mendapatkan penyuluh	2.087.171.000				
3	Layanan dukungan manajemen eselon I	220.200.000				
4	Layanan perkantoran	44.212.360.000	1.650.000.000	3,73	1.677.285.458	3,79
5	Data dan informasi sumberdaya perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD yang dihasilkan	3.600.000.000				
6	Sarana dan prasaranan riset perikanan	1.671.425.000				
7	Data dan/atau informasi riset perikanan yang dihasilkan	294.671.000				
8	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	559.815.000				
9	Layanan Perkantoran	13.074.385.000	300.000.000	2,29	319.785.267	2,45
	TOTAL	68.706.752.000	1.950.000.000	2,84	1.997.070.725	2,91



Tabel 2. Perkembangan anggaran Bulan Februari

No	UPT / Output	DIPA	Anggaran s/d Februari 2018			
			Target		Realisasi	
		Rp	Rp	%	Rp	%
	BRPPUPP Palembang					
	PELATIHAN DAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
1	Tenaga penyuluh yang melakukan penyuluhan	2.986.725.000	115.000.000	3.85	114.240.000	3.82
2	Kelompok pelaku utama/usaha yang mendapatkan penyuluh	2.087.171.000	5.600.000	0.27	5.657.342	0.27
3	Layanan dukungan manajemen eselon I	220.200.000	50.000.000	22.71	42.292.040	19.,21
4	Layanan perkantoran	44.212.360.000	5.600.000.000	12,67	5,630,447,932	12,74
5	Data dan informasi sumberdaya perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD yang dihasilkan	3.600.000.000	0	0,00	3.704.976	0.10
6	Sarana dan prasaranan riset perikanan	1.671.425.000	0	0	0	0
7	Data dan/atau informasi riset perikanan yang dihasilkan	294.671.000	0	0	100.000	0.03
8	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	559.815.000	46.000.000	8,22	46.235.679	8.26
9	Layanan Perkantoran	13.074.385.000	1,340,000,000	10,29	1,342,322,621	10,27
	TOTAL	68.706.752.000	7,156,600,000	10,42	7,185,000,590	10,46



BRPPUPP

Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan
Inland Fishery Resources Development And Management Department (IFRDMD)

Tabel 2. Perencanaan anggaran Bulan Maret

No	UPT / Output	DIPA	Anggaran s/d Maret 2018			
			Target		Realisasi	
		Rp	Rp	%	Rp	%
	BRPPUPP Palembang					
	PELATIHAN DAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
1	Tenaga penyuluh yang melakukan penyuluhan	2.986.725.000	130.000.000	4,35	131.448.000	4,40
2	Kelompok pelaku utama/usaha yang mendapatkan penyuluh	2.087.171.000	18.000.000	0,86	18.075.342	0,86
3	Layanan dukungan manajemen eselon I	220.200.000	50.000.000	22,70	46.973.440	21,33
4	Layanan perkantoran	44.212.360.000	10.100.000.000	22,88	10.118.429.561	22,89
5	Data dan informasi sumberdaya perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD yang dihasilkan	3.600.000.000	436.000.000	12,12	436.855.891	12,13
6	Sarana dan prasarana riset perikanan	1.671.425.000	0	0	0	0
7	Data dan/atau informasi riset perikanan yang dihasilkan	294.671.000	14.500.000	4,92	14.696.410	4,98
8	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	559.815.000	178.000.000	31,79	177.708.237	31,74
9	Layanan Perkantoran	13.074.385.000	2.400.000.000	18,37	2.434.893.917	18,62
	TOTAL	68.706.752.000	13.326.500.000	19,40	13.379.080.798	19,47



IV/ PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Sesuai dengan visi dan misi Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2018 Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

4.2. PENUTUP

Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan Riset dan pengembangan IPTEK KP guna pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat sesuai dengan kemampuan sumber daya peneliti yang tersedia termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan. Langkah percepatan pelaksanaan kegiatan Riset dan pengembangan pada awal tahun anggaran dan mengkaji perkembangan permasalahan aktual dan terkini masyarakat KP perlu terus dilakukan.

LAPORAN KINERJA Triwulan I TA 2018 ini diharapkan dapat menjadi pertanggung jawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuklah pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Selain itu, Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi rencana kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada triwulan berikutnya.